

**TESIS**  
**TINJAUAN TENTANG PENGATURAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BIRO PERJALANAN DI NTB**  
**DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEMANFAATAN**



**IVANA ELYSIA SINARSO**

**NPM: 215214419**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2023**





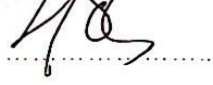
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

---

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : Ivana Elysia Sinarso  
Nomor Mahasiswa : 215214419  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : **TINJAUAN TENTANG PENGATURAN PERIZINAN  
BERUSAHA BIRO PERJALANAN DI NTB DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
TEORI KEMANFAATAN**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 26 Juli 2023.

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H. M.Hum	
2. Sekretaris	Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum	
3. Anggota	Dr. Hyronimus Rhiti, SH.,LL.M.	

Ketua Program Studi



Dr. Hyronimus Rhiti, SH.,LL.M.

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ivana Elysia Sinarso

NPM : 215214419

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tesis dengan judul “Tinjauan tentang Pengaturan Perizinan Berusaha Biro Perjalanan di NTB Ditinjau dari Perspektif Teori Kemanfaatan” merupakan hasil karya asli, bukanlah merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya tulis milik orang lain, maka siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

Yang menyatakan,

Ivana Elysia Sinarso

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Tinjauan tentang Pengaturan Perizinan Berusaha Biro Perjalanan di NTB Ditinjau dari Perspektif Teori Kemanfaatan”. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pasca sarjana Program Studi Magister Hukum. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam proses penulisan tesis ini dari awal hingga akhir, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, saran dan dukungan selama proses penulisan tesis ini hingga selesai.
2. Dr. Ign. Sumarsono Rajarho, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, saran dan dukungan selama proses penulisan tesis ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat. Terima kasih

Yogyakarta, 14 Juli 2023

Ivana Elysia Sinarso

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Tinjauan Mengenai Pengaturan Kewajiban Pendaftaran Biro Perjalanan di Indonesia	11
1.1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata	11
1.2. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata	14
1.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	16
1.4. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah	18
1.5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.	24
2. Pengertian dan Fungsi Pendaftaran Usaha Biro Perjalanan	25
3. Perubahan Pendaftaran Usaha Biro Perjalanan menurut Undang-Undang	27

4. Tinjauan Mengenai Pengertian Biro Perjalanan Menurut Undang-Undang	29
B. Landasan Teori	30
1. Perizinan	30
2. Legalitas Usaha	33
3. Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham	34
C. Batasan Konsep	40
BAB III CARA PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan	42
C. Data	43
D. Cara Pengumpulan Data	47
E. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	48
F. Sistematika Laporan Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Tinjauan Umum tentang Situasi Biro Perjalanan di NTB	53
a. Wilayah Kota Mataram	59
b. Wilayah Lombok Utara	62
c. Wilayah Lombok Tengah	63
B. Faktor-faktor yuridis yang membuat masih terdapatnya biro perjalanan di NTB yang tidak melakukan pendaftaran untuk izin operasional	65
C. Ditinjau dari Perspektif Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham	69
a. Bagi Biro Perjalanan Perjalanan Berizin	71
b. Bagi Biro Perjalanan Belum Berizin	74
c. Bagi Wisatawan	76
d. Bagi Pemerintah	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rincian Jumlah Biro Perjalanan di Wilayah NTB	54
Tabel 4.2. Biro Perjalanan di Kota Mataram	59
Tabel 4.3. Biro Perjalanan di Lombok Utara	62
Tabel 4.4. Biro Perjalanan di Lombok Tengah	63



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaturan perizinan biro perjalanan di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) yang kemudian ditinjau dari teori kemanfaatan Jeremy Bentham. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana dalam Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dengan fakta yuridis di lapangan ditemukan masih adanya biro perjalanan yang belum berizin yang beroperasi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari 2 pelaku usaha biro perjalanan belum berizin, 2 pelaku usaha biro perjalanan sudah berizin, 1 pihak Asosiasi GIPI, 3 pihak DPMPTSP dan 1 pihak Dinas Pariwisata. Penelitian ini menemukan dua faktor penyebab masih adanya biro perjalanan yang belum mendaftarkan izin untuk dapat beroperasi. Hasil dari analisis teori kemanfaatan Jeremy Bentham ditemukan bahwa pemerintah dan pelaku usaha sudah berizin merasakan *pain*, pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya merasakan *pleasure* dan wisatawan merasakan *pain* dan *pleasure*.

**Kata Kunci:** Perizinan Berusaha, Biro Perjalanan, Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham.



## **ABSTRACT**

*This study aims to review travel agency licensing arrangements in NTB Province (West Nusa Tenggara) which is then reviewed from Jeremy Bentham's theory of utilitarianism. This research is a normative research where in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and Minister of Tourism Regulation Number 10 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services in the Tourism Sector with juridical facts in the field it is found that there are still unlicensed travel agents operating. The researcher collected data by conducting interviews with informants consisting of 2 unlicensed travel agency business actors, 2 licensed travel agency business actors, 1 GIPI Association, 3 DPMPTSP parties and 1 Tourism Office. This study found two factors causing the existence of travel agencies that have not registered permits to operate. The results of the analysis of Jeremy Bentham's theory of utilitarianism found that the government and business owners have permission to feel pain, business owners who have not registered their businesses feel pleasure and tourists feel pain and pleasure.*

**Keywords:** *Business Licensing, Travel Agency, Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory.*